



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

Rabu, 8 September 2021
Edisi : 00226437 / GBF / IX / 2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

RABU, 8 SEPTEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. HORTIKULTURA :
 - Nasib Petani Cabai (R)..... 13
2. PERKEBUNAN :
 - PTPN XII Ekspor Perdana Kopi 18 Ton Senilai Rp1,5 M (SI)..... 1
 - PTPN XII Ekspor Kopi ke United Kingdom (ID)..... 2
 - Kemitraan Jadi Cikal Bakal Korporasi Pekebun Sawit (ID)..... 3
3. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Komisi IV Ingatkan Kementan Hati-Hati (RM)..... 4
 - Pemerintah Targetkan 17 Waduk Baru Tahun Ini (MI)..... 5
 - 45% Anggaran Pertanian untuk Menjaga Ketersediaan Pangan (ID)..... 6-7
 - Utama Karya Tuntaskan Bendungan Bendo (R)..... 8-9
4. KETAHANAN PANGAN :
 - Inovasi Kampus Berdaulat Pangan saat Pandemi (SI)..... 14-15
5. PERTANIAN UMUM :
 - Pangkas Rantai Distribusi Pertanian (RM)..... 10
 - Multi Agro Bangun Tempe Park di Lahan 5,8 Ha (MI)..... 11
 - Kontribusi Sektor Pertanian bagi Ekonomi Nasional (ID)..... 12

00000000 O 00000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☒ Seputar Indonesia	TANGGAL 8/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 12 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

PTPN XII Ekspor Perdana Kopi 18 Ton Senilai Rp1,5 M

SURABAYA - PT Perkebunan Nusantara XII di 2021 ekspor perdana kopi jenis arabika sebanyak 18 ton senilai Rp1,5 miliar dengan tujuan Inggris. Komoditas tersebut merupakan hasil panen 2021.

Direktur PT Perkebunan Nusantara XII, Siwi Peni, mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 sejak tahun lalu permintaan kopi di pasar dunia belum pulih. Para *buyer* dalam posisi masih menunggu. "Kami mampu menembus pasar internasional karena memiliki pelanggan loyal di negara-negara di Eropa, Asia, maupun Amerika Serikat. Dalam ekspor perdana ini kami mengirimkan 18 ton kopi arabika untuk memenuhi permintaan *buyer* dengan destinasi pelabuhan tujuan ke Teesport di United Kingdom," ujarnya di sela acara Ekspor Perdana Kopi Produksi PTPN XII Tahun 2021 di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Kopi merupakan salah satu tanaman utama yang diusahakan

PTPN XII dengan total areal 8.985,89 hektare (ha) terdiri atas kopi jenis arabika seluas 4.478,50 ha dan kopi robusta 4.507,39 ha. "Pemanenannya dilakukan sejak Juli lalu dan berakhir September ini," kata Siwi. 8/9/12

Kopi arabika yang diekspor perdana tahun ini merupakan hasil panen dari Kebun Blawan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pengelolaannya didukung teknik budi daya dan diolah secara *full washed*. Perseoran, kata Siwi, memperhatikan sistem manajemen mutu *UTZ Certified*, Sertifikasi Halal MUI, *good agriculture practice* (GAP) serta *good manufacturing practice* (GMP) untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik yang mempunyai keunggulan kompetitif. "Kopi arabika yang kami hasilkan telah dikenal di pasar dunia sebagai *specialty arabica coffee* dan teregister di AS dengan nama Java Coffee. Selama bertahun-tahun memiliki pembeli

fanatik di sejumlah negara," paparnya.

Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support PTPN XII Tri Septiono dalam kesempatan yang sama menyampaikan, setelah melakukan ekspor perdana kopi, PTPN XII masih akan melakukan pengiriman lagi komoditas tersebut ke mitra bisnis di Inggris, Jerman, Jepang, dan AS. Target ekspor kopi hingga akhir Desember mendatang sebanyak 660 ton untuk jenis arabika dan kopi robusta 1.199 ton.

Komoditi kopi dibudidayakan dan dikelola di 12 kebun milik PTPN XII yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Untuk kopi jenis arabika dibudidayakan di Kebun Kalisat Jampit, Pancur Angkrek, Blawan, dan Kayumas. Adapun kopi robusta dibudidayakan di Kebun Kaliselogiri, Malang, Gunung Gumitir, Silosari, Renteng, Zeelandia, Bangelan, dan Ngrangkah Pawon.

alimasduki

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 8/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN II /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☒ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

PTPN XII Ekspor Kopi ke United Kingdom

SURABAYA-PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) melakukan ekspor perdana kopi jenis Arabika sebanyak 18 ton senilai Rp 1,50 miliar ke United Kingdom. Kopi tersebut merupakan hasil panen tahun ini. Kopi merupakan salah satu tanaman utama PTPN XII dengan total areal seluas 8.985,89 hektare (ha) terdiri atas kopi jenis Arabika 4.478,50 ha dan kopi Robusta 4.507,39 ha dan proses panen dilakukan sejak Juli 2021 hingga September 2021.

Direktur PTPN XII Siwi Peni mengatakan, ekspor kali ini merupakan terobosan di tengah pandemic Covid-19, karena permintaan komoditas kopi di pasar dunia belum pulih dan para pembeli masih menunggu (*wait and see*). Selain kopi, PTPN XII juga juga mengusahakan tanaman

karet, teh, kakao, tebu, dan aneka kayu. "Kami mampu menembus pasar ekspor karena memiliki pelanggan loyal di negara-negara Eropa, Asia, maupun Amerika Serikat (AS). Dalam ekspor perdana ini, kami mengirimkan 18 ton kopi Arabika untuk memenuhi permintaan *buyer* dengan destinasi pelabuhan tujuan ke Teesport United Kingdom," kata Siwi di sela acara Ekspor Perdana Kopi Produksi PTPN XII Tahun 2021 di Gudang PTPN XII, Jalan Perak Timur, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/9). (P-1)

Siwi menjelaskan, kopi Arabika yang diekspor perdana ini merupakan hasil panen dari Kebun Blawan di Kabupaten Bondowoso, Jatim, yang pengelolaannya didukung teknik budidaya serta diolah secara *full washed* yang memper-

hatikan sistem manajemen mutu UTZ Certified, Sertifikasi Halal MUI, GAP (Good Agriculture Practice) serta GMP (Good Manufacturing Practice) untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik yang mempunyai keunggulan kompetitif. "Kopi Arabika yang kami hasilkan telah dikenal di pasar dunia sebagai *Specialty Arabica Coffee* dan teregister di AS dengan nama *Java Coffee* dan selama bertahun-tahun memiliki pembeli fanatik di sejumlah negara," papar Siwi.

Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support PTPN XII Tri Septiono mengatakan, setelah melakukan ekspor perdana kopi, PTPN XII masih akan melakukan pengiriman lagi komoditas tersebut ke mitra bisnis di Inggris, Jerman, Jepang, dan AS. (ros)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/3/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kemitraan Jadi Cikal Bakal Korporasi Pekebun Sawit

JAKARTA—Program kemitraan antara pekebun dengan perusahaan yang berhasil meningkatkan kesejahteraan pekebun menjadi cikal bakal pembentukan korporasi pekebun sawit. "Pekebun sawit merupakan kekuatan besar dengan luas mencapai 6,94 juta hektare (ha) ha dari total luas kebun sawit nasional 16,38 juta ha. Pada masa lalu lewat kemitraan dengan perusahaan, pekebun berhasil meningkatkan kesejahteraannya. Keberhasilan ini menjadi cikal bakal untuk membentuk korporasi pekebun sawit pada masa sekarang," ujar Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Heru Tri Widarto, belum lama ini.

Konsep pengembangan korporasi pekebun adalah pekebun terkonsolidasi dalam kelompok

tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan) ataupun koperasi, mendapat fasilitas sarpras, pembinaan dan pendampingan dari pemerintah dan mitra. Pekebun sebagai anggota korporasi mengusahakan budi daya sawit, koperasi bersama BUMN/bumdes membentuk PT untuk mengelola korporasi petani, swasta sebagai mitra strategis korporasi sedangkan korporasi pekebun memasarkan hasil produknya. "Kemitraan harus diperkuat, transparansi menjadi kata kunci. Ke depan tidak perlu lagi ada yang pihak yang harus menjodohkan pekebun dengan perusahaan karena masing-masing saling membutuhkan," kata Heru. (D-1)

Pada program peremajaan sawit rakyat (PSR), menurut Heru, Ditjen Perkebunan Kementan mewajibkan kemitraan

karena tandan buah segar (TBS) pekebun nantinya perlu ada yang menampung. Sementara itu, Ditjen Perkebunan dengan pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) membuat program pengembangan sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan dan pelatihan juga sarana dan prasarana yang ditujukan bagi pekebun. "Sarpras (sarana dan prasarana) bukan hanya alsintan (alat dan mesin pertanian), perbaikan jalan, ISPO tapi nanti akan ke pembangunan PKS (pabrik kelapa sawit)," ujar dia.

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya supaya pekebun nanti mampu mengelola korporasi. Perlu studi lebih lanjut supaya korporasi ini berjalan dengan baik. Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainability Palm Oil) juga penting supaya

ketelusuran produk berjalan dengan baik dan produknya diakui konsumen. Korporasi pekebun juga bisa masuk ke penyediaan benih unggul siap salur, sehingga tidak perlu lagi misalnya PSR di Sulawesi mendatangkan dari Medan sehingga biaya meningkat dan risiko benih layu atau mati. Korporasi pekebun nanti produknya bukan lagi TBS tetapi bisa saja CPO sehingga kemitraan harus diselaraskan lagi.

Direktur Kemitraan BPD PKS Edi Wibowo menyatakan, pihaknya sangat mendukung pembentukan korporasi pekebun. Saat ini, BPD PKS mendanai PSR, sarpras, pengembangan sumber daya manusia (SDM), selain itu program riset yang dibiayai oleh BPD PKS juga salah satu tujuannya meningkatkan produktivitas pekebun. (dho)

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☒ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 8/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 7
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☒ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Soal Anggaran Food Estate Rp 600 Miliar Komisi IV Ingatkan Kementan Hati-hati

Senayan menyoroti dana pembangunan kawasan Food Estate seluas 100 hektare sebesar Rp 600 miliar di anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) 2022. Nominal tersebut terbilang besar, mengingat pembangunan infrastruktur di kawasan itu bukan tanggung jawab Kementan.

ANGGOTA Komisi IV Suhardi Duka mengatakan, anggaran Food Estate 100 hektare Rp 600 miliar itu berarti per hektare Rp 6 miliar.

"Apa yang mau ditanam? Alat apa yang mau dibangun di situ? Infrastruktur Food Estate kan di Kementerian PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), bukan di (Direktorat) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)," heran Suhardi dalam rapat kerja bersama pejabat eselon I Kementan terkait Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2022 di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan Kementan hati-

hati dengan alokasi anggaran Food Estate. Dia tidak ingin postur anggaran yang tidak tepat kemudian berimbas kepada persoalan hukum di kemudian hari.

"Hati-hati Pak. Ini kalau anggaran tidak jelas, memperbesar harga satuan hati-hati. Hukum kadang-kadang lemah tapi kadang kala tajam," warning Suhardi.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi IV DPR Edward Tannur. Menurutnya, Food Estate ini memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengejar swasembada pangan. Namun, harus dipikirkan juga bahwa dana yang digulirkan ini benar-benar efektif dan efisien.

Apalagi jika anggaran digulirkan begitu saja ke masyarakat tanpa pendampingan dan pengawasan ketat. Yang terjadi malah digunakan di luar untuk itu. "Perlu kita lakukan evaluasi dan penangan yang betul-betul mengena," tegas politisi PKB asal Nusa Tenggara Timur ini.

Meski begitu, hasil pantauan di daerah pilihannya di Sumba Tengah, kawasan Food Estate memang dinanti masyarakat.

"Saya tetap mendukung karena kita memang butuh

pangan yang sangat besar sekali. Jangan kita swasembada pangan tapi akhirnya impor juga," ucapnya.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan program kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDM) Kementan terkait pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bidang pertanian sebesar Rp 16 miliar.

Dia bertanya-tanya, pelatihan ini untuk siapa, target dan sasarannya ke siapa karena pelatihan ini untuk 4.900 orang.

"Nanti anggota Komisi IV tolong cek di dapilnya ini kalau memang ada. Benar nggak ada advokasi dan sertifikasi ini karena kalau kita hitung Rp 16 miliar, satu orang itu Rp 3,3 juta," tegas Sudin.

Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan alokasi anggaran BPPSDM Kementan untuk belanja modal sarana pendidikan sebesar Rp 75 miliar. Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah berkomitmen bahwa belanja pemerintah dipe-runtukkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, tidak untuk belanja berupa bangunan fisik. "Saya minta dievaluasi lagi," tegas Sudin.

Dirjen PSP Kementan Ali Jamil menegaskan, anggaran pembangunan kawasan Food Estate ini memang dilaksanakan melalui dua metode, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Ada pun penganggaran ini terdiri dari penyiapan 50 ribu hektare yang terdiri dari penyiapan

Survei Investigasi Design (SID) untuk ekstensifikasi dan sebagian lagi untuk intensifikasi termasuk penyiapan saprodinya.

"Itu ada rinciannya Pak, nanti kami siapakan secara tertulis," katanya.

Begitu juga terkait perlindungan lahan. Dia memastikan pihaknya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sampai saat ini, sudah ada 219 kabupeten kota yang telah membuat perda sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan LP2B yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Tahun ini kami di PSP terkait perlindungan lahan, kami juga memetakan ke 8 provinsi untuk dimasukkan ke dalam perdanya nanti," ujarnya. ■ KAL

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pemerintah Targetkan 17 Waduk Baru Tahun Ini

PEMERINTAH berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian di Tanah Air. Salah satu langkah konkretnya dengan membangun banyak bendungan.

Pada tahun ini pemerintah menargetkan sebanyak 17 waduk baru bisa diresmikan dan beroperasi secara penuh. Sejauh ini, dari target yang ditetapkan, sudah terealisasi tujuh bendungan, yakni Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, Bendungan Napun Gete di NTT, Bendungan Sindang Heula di Banten, Bendungan Kuningan di Jawa Barat, Bendungan Way Sekampung di Lampung, serta Bendungan Tukul dan Bendo di Jawa Timur.

"Tahun ini akan diselesaikan 17 bendungan. Sekarang sudah tujuh, termasuk Bendungan Bendo di Ponorogo, Jawa Timur. Hari ini sudah selesai, sudah rampung, dan siap difungsikan," ujar Jokowi di Ponorogo, Jawa Timur, kemarin.

Pada pekan ini, Kepala Negara juga akan meresmikan Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan. Masih di provinsi yang sama, Oktober nanti akan dioperasikan juga Bendungan Karalloe. Disusul

Bendungan Ladongi di Sulawesi Tenggara, Bendungan Bintang Bano di NTB, Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Jawa Barat.

Pada Desember, ada empat bendungan terakhir, yakni Bendungan Tugu dan Gongseng di Jawa Timur, Bendungan Pidekso di Jawa Tengah, dan Bendungan Margatiga di Lampung. "Sekali lagi, di 2021 akan diselesaikan 17 bendungan. Artinya, pasokan air akan bertambah sehingga kita harapkan bisa meningkatkan produktivitas di bidang pertanian," ucap mantan Wali Kota Solo itu.

Terkait dengan Bendungan Bendo, ia berpesan kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Infrastruktur air yang dibangun dengan biaya sebesar Rp1,1 triliun itu memiliki kapasitas tampung 43 juta meter kubik dengan luas genangan 170 hektare dan tinggi bendungan 74 meter. **MI. 9**

Bendungan tersebut bisa mengairi saluran irigasi seluas 7.800 hektare dan sebagai penyedia air baku sebesar 370 liter per detik. (Pra/N-1)

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

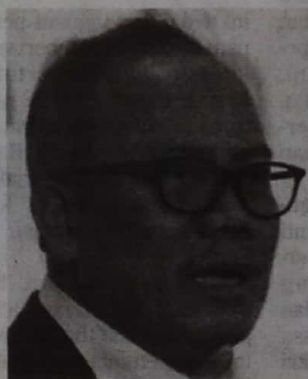
- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

45% Anggaran Pertanian untuk Menjaga Ketersediaan Pangan

Oleh Ridho Syukra (17-11)

► JAKARTA – Anggaran sektor pertanian tahun depan mencapai Rp 14,45 triliun dengan 45% di antaranya dialokasikan untuk program peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Pada 2022, Kementerian Pertanian (Kementan) fokus pada peningkatan ketersediaan 11 komoditas pangan, yakni padi, jagung, kedelai, gula tebu, daging sapi/kerbau, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan kelapa.

Demikian disampaikan Sekjen Kementan Kasdi Subagyo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Selasa (7/9). Pagu indikatif Kementan untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 semula Rp 14,51 triliun dan berdasarkan surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tertanggal 23 Juli 2021 menjadi Rp 14,45 triliun karena adanya penyesuaian pinjaman luar negeri dan situasi pandemi Covid-19. Sementara itu, target produksi ke-11 komoditas pangan yang menjadi fokus Kementan pada



Kasdi Subagyo

TA 2022 mencakup padi 55,20 juta ton, jagung 20,10 juta ton, kedelai 0,20 juta ton, gula tebu 2,30 juta ton, daging sapi/kerbau 444.550 ton, cabai 2,87 juta ton, bawang merah 1,64 juta ton, bawang putih 91 ribu ton, kopi 795.450 ton, kakao 780.900 ton, dan kelapa 2,86 juta ton.

Kasdi menjelaskan, secara rinci anggaran Kementan pada 2022 teralokasi untuk program peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas Rp 6,49 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri Rp 1,74 triliun, program riset serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Rp 356,79 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp 770,28 miliar, dan program dukungan manajemen Rp 5,09 triliun. "Dari anggaran pertanian tahun depan sebesar Rp 14,45 triliun, sebanyak Rp 14,05 triliun untuk menjalankan fungsi ekonomi dan Rp 396,69 miliar untuk fungsi pendidikan," ujar Kasdi.

Kasdi mengatakan, program peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas dilaksanakan Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Karantina Pertanian.

"Fokus kami adalah pengembangan padi, jagung, kedelai, pangan lokal, dan pangan prioritas lainnya. Juga penguatan perbenihan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, serta peningkatan produksi tanaman sayuran, perkebunan, tanaman pangan, dan budidaya lainnya," kata Kasdi.

Menurut Kasdi, Kementan juga menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 2,20 triliun pada 2022 untuk program pembangunan pertanian di daerah yang difokuskan pada peningkatan produksi cadangan pangan, peningkatan nilai tambah produk pertanian dan kesejahteraan petani, serta peningkatan sarana prasarana dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan berbasis korporasi. DAK fisik sebesar itu akan dialokasikan untuk 288 kabupaten/kota. Sementara DAK nonfisik untuk program ketahanan pangan nonpertanian dianggarkan dengan pagu Rp 200 miliar yang akan dialokasikan pada 510 kabupaten/kota. Rancangan program DAK fisik di bidang pertanian pada TA 2022 akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian, pembangunan jalan pertanian, pembangunan lumbung pangan masyarakat, sarana prasarana pascapanen

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

dan pengolahan hasil pertanian, dan pembangunan industri olahan pangan lokal.

Arah kebijakan DAK fisik untuk penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi yang terintegrasi hulu-hilir demi penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan arah program DAK nonfisik untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan atau kemandirian pangan rumah tangga, dukungan terhadap operasionalisasi penyuluh pertanian, serta pelayanan kesehatan ternak. Daerah yang diprioritaskan dalam DAK nonfisik yaitu daerah rentan rawan pangan, daerah dengan kasus *stunting*

masih tinggi, daerah pertanian perkotaan, dan daerah pengembangan kawasan ternak.

KUR Dipermudah

Pada bagian lain, pemerintah memastikan persyaratan kredit usaha rakyat (KUR) pertanian semakin dipermudah guna meningkatkan nilai tambah pascapanen, seperti dalam pengadaan *rice milling unit* (RMU). "Persyaratan KUR harus dipermudah agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah pascapanen sehingga program ini semakin dirasakan

manfaatnya oleh petani," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin. Kepala Negara memiliki perhatian khusus terhadap penyaluran KUR pertanian yang plafonnya untuk tahun ini mencapai Rp 70 triliun.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, program KUR merupakan bentuk perhatian negara terhadap nasib petani agar lebih sejahtera. Apalagi, KUR memiliki suku bunga rendah, hanya 6%. "Karena itu, negara mendorong agar kesejahteraan petani terus meningkat salah satunya melalui

layanan KUR pertanian yang memiliki suku bunga rendah," kata Mentan. Program KUR dirancang untuk membuka akses skala ekonomi yang lebih terbuka dan mandiri. Artinya, tingkat usaha petani nantinya tidak akan tergantung kepada negara tapi mereka memiliki cara untuk meningkatkan nilai sejahtera. Bahkan, saat ini Kementan sedang mendorong klaster KUR komoditas porang dan sarang burung walet sebagai komoditas unggulan baru yang dipersiapkan untuk ekspor.

Mentan juga mendorong para

kepala daerah di seluruh Indonesia agar fokus terhadap pengembangan potensi pertanian lokal yang bisa diekspor secara serentak. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan Merdeka Ekspor yang digelar pada 14 Agustus lalu sukses menghadirkan devisa negara sebesar Rp 7,29 triliun. "Merdeka Ekspor itu dibuat untuk menghadirkan konsolidasi emosional semua daerah agar bisa melakukan ekspor sekaligus memberikan rangsangan agar menggali potensi yang ada," ujar Mentan. (tl)

2

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Sepuluh Indonesia | TANGGAL 8/4/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembinaan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Hutama Karya Tuntaskan Bendungan Bendo

Bendungan Bendo menjadi satu dari empat bendungan prioritas pemerintah.

■ DESSY SUCIATI SAPUTRI,
RAHAYU SUBEKTI

JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) berhasil menuntaskan proyek pembangunan lanjutan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pembangunan bendungan yang digarap bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) itu diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bendungan Bendo kini telah siap untuk menyuplai air irigasi seluas 7.800 ha lahan pertanian di wilayah Ponorogo dan Madiun," kata Direktur Operasi I Hutama Karya Novias Nurendra, Selasa (7/9). R-9

Novias menjelaskan, nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp 1,05 miliar. Ia mengatakan, proyek pada tahap 1 sebesar Rp 716,5 juta dan tahap 2 sebesar Rp 334,5 juta.

"Cakupan pekerjaan yang kami garap dalam proyek ini, antara lain, pekerjaan jalan akses masuk, pekerjaan bangunan pelimpah, pekerjaan bangunan fasilitas umum, serta pekerjaan bendungan utama," ujar Novias.

Novias mengatakan, Bendungan Bendo dirancang agar

dapat menyuplai air untuk daerah irigasi Bendo dengan luas 3.300 ha dan suplesi daerah irigasi Smart Irrigation Monitoring (SIM) dengan luas 4.500 ha. Selain itu, Bendungan Bendo dibangun untuk penyediaan air baku dengan debit sebesar 370 liter per detik serta reduksi banjir dari 420 meter kubik per detik menjadi 290 meter kubik per detik.

Novias menambahkan, untuk percepatan pembangunan bendungan, Hutama Karya menggunakan beberapa peralatan konstruksi yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan. "Kami telah memulai pembangunan Bendungan Bendo ini sejak 2013 sampai 2019 untuk pembangunan tahap satu," kata Novias.

Meskipun dalam pembangunan lanjutan yang dimulai pada 2019 sampai 2021 dihadapkan dengan pandemi Covid-19, pengerjaan tetap selesai sesuai target. Pembangunan bendungan tersebut membuka akses pekerjaan dan menyerap 250 tenaga kerja lokal.

Saat peresmian Bendungan Bendo, Jokowi mengatakan, adanya bendungan akan menyediakan pasokan air bagi la-

han pertanian dan mengurangi potensi banjir. Jokowi mengatakan, bendungan tersebut akan menyediakan irigasi untuk 7.800 ha sawah dan pasokan air baku 370 liter per detik.

"Bendungan ini juga bisa mengurangi banjir, mereduksi banjir sebesar 31 persen atau 117 meter kubik per detik," kata Jokowi.

Jokowi meminta bendungan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan disambungkan ke seluruh jaringan irigasi yang ada. Dengan demikian, masyarakat dan para petani bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya.

Selain itu, Jokowi mengatakan, pemerintah telah dan akan

“

Bendungan Bendo kini telah siap untuk menyuplai air irigasi seluas 7.800 ha lahan pertanian di wilayah Ponorogo dan Madiun.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 8 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

menyelesaikan 17 bendungan pada 2021. "Artinya, produktivitas di bidang pertanian akan bertambah pasokan air dan kita harapkan akan meningkatkan produktivitas para petani," kata Jokowi.

Bendungan Bendo menjadi satu dari empat bendungan prioritas yang diresmikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Kehadiran bendungan tersebut nantinya dapat mendukung irigasi pertanian serta pengembangan sektor ekonomi lainnya di kawasan tersebut yang akan berdampak positif untuk masyarakat secara luas.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, di bawah bendungan ada bagian yang berfungsi sebagai gudang air dari Sungai Keyang karena menyambung dengan empat bendungan lain, yaitu Bendung Nyinden, Bendung Kori, Bendung Wirangan, dan Bendung Jati. Tiga bendung pertama berada di Ponorogo yang mengairi 3.300 ha lahan, sedangkan Bendung Jati berada di Madiun yang mengairi lahan 4.500 ha.

"Dengan adanya *storage* ini sudah langsung bisa dimanfaatkan untuk menyuplai bendung bendung di bawahnya sehingga meningkatkan indeks petani dari 170 menjadi 260 per tahun," kata Basuki.

■ antara ed: citra listya rini

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pangkas Rantai Distribusi Pertanian

SEGARI, *startup grocery social commerce*, meraih pendanaan Seri A sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 227,6 miliar. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur terkait rantai distribusi produk-produk pertanian di Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Segari Yosua Setiawan mengatakan, dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak mulai beroperasi, Segari menjadi pilihan warga Jakarta dan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan produk segar.

Hal ini terlihat dari jumlah pengguna, pesanan, dan pendapatan yang terus meningkat, bahkan lebih dari 20 kali lipat.

"Untuk itu, pendanaan yang kami peroleh akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, memastikan proses lebih efisien dari petani ke konsumen," ujarnya. PM. to

Dengan begitu, Segari dapat tumbuh lebih besar dan mampu memberikan dampak sosial yang positif bagi para petani lokal.

Untuk melakukannya, ia berencana memperkuat dan menambah tim di berbagai bidang. Termasuk operasional, teknologi, dan *marketing*. Karena ia menyadari, rantai distribusi pertanian adalah salah satu masalah paling kompleks di Indonesia.

"Masih terdapat banyak lapisan dari petani hingga produk pertanian sampai ke tangan konsumen," akunya.

Karenanya, ia berharap, keberadaan Segari dapat berkontribusi lebih besar lagi. Baik itu bagi konsumen, agar bisa menerima bahan makanan

berkualitas dengan lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Maupun untuk petani, agar dapat menerima harga yang adil dari produk yang dijual.

"Kami berkomitmen menyederhanakan rantai distribusi di Indonesia yang kompleks dengan memanfaatkan teknologi," ungkapnya.

Saat ini, guna mengakses berbagai produk Segari, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, daging hingga makanan pokok, pelanggan dapat melakukan pemesanan langsung melalui situs web atau aplikasi Segari.

"Hanya dalam waktu 15 jam, produk makanan segar akan sampai ke tangan konsumen dari petani," ucapnya.

Menurutnya, waktu pengiriman yang cepat, kualitas produk lebih baik, dan biaya yang lebih rendah bisa dinikmati pelanggan karena pihaknya memiliki desentralisasi gudang dan jaringan mitra penjualan.

"Sebagian besar sumber produk segar Segari didapatkan langsung dari para mitra petani di Jawa dan Sumatera," akunya.

Untuk diketahui, pendanaan Seri A ini dipimpin oleh Go-Ventures dengan partisipasi dari Susquehanna International Group (SIG). Dan berbagai investor strategis seperti Alfamart, Gunung Sewu Group (salah satu grup perusahaan pertanian dan pangan terbesar di Indonesia), dan Intrinity Capital yang berafiliasi dengan Gulaku.

Selain itu, BEENEXT, AC Ventures dan Saison Capital, yang merupakan para investor Segari sejak tahap awal (seed) juga ikut terlibat dalam putaran pendanaan ini. ■ IMA

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Multi Agro Bangun Tempe Park di Lahan 5,8 Ha

DISTRIBUTOR kacang kedelai PT FKS Multi Agro Tbk tengah membangun sebuah pusat penelitian dan pengembangan tempe bertaraf internasional guna pelestarian budaya tempe. Pusat penelitian bernama Tempe Park itu dibangun di area seluas 5,8 ha yang berlokasi di Jawa Barat.

Project Manager Tempe Park Hairudin Ali mengatakan inisiatif itu bukan hanya untuk melestarikan budaya tempe, melainkan juga punya misi untuk menjadi pusat pelatihan terpadu.

Pusat pelatihan itu bersifat terbuka, baik untuk para perajin tempe yang sudah memulai maupun bagi mereka yang baru ingin merintis. Targetnya, lebih dari 100 ribu perajin tempe akan bergabung dari seluruh Indonesia.

"Kami berharap dapat ikut memajukan kesejahteraan para perajin tempe dan juga meningkatkan kualitas produksi tempe dari segi rasa, kebersihan, keamanan, serta inovasi lain yang berkesinambungan dan bertanggung jawab," paparnya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Hairudin yang juga menjabat New Product Development Head di FKS Multi Agro Tbk menyampaikan dukungan perusahaan untuk suksesnya perkembangan tempe dan kesejahteraan para perajinnya bukan hanya secara ekonomi dan sosial,

melainkan juga demi melestarikan budaya dan produk kebanggaan Indonesia di kancah global.

Dia mengatakan pembangunan Tempe Park itu rencananya akan diselesaikan secara bertahap dengan pembangunan tahap pertama yang diharapkan selesai pada penghujung 2021 ini.

Direktur Utama PT FKS Multi Agro Tbk Po Indarto Gondo menambahkan perusahaannya berkomitmen ikut menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi covid-19 saat ini.

Perusahaan pemasok kacang dan bungkil kedelai itu akan memperkuat rantai pasokan dan memperluas jangkauan operasional ke seluruh Indonesia.

"Perusahaan menyadari bahwa kontribusi swasta sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi, masyarakat harus tetap memperoleh jaminan ketersediaan bahan pangan untuk menghindari terjadinya krisis," paparnya.

Sebagai catatan, perusahaan itu saat ini menguasai pasar perdagangan kacang kedelai nasional sebesar 37% dan 19% untuk bungkil kedelai. Pada 2020, sebanyak 2,5 juta ton kacang kedelai dan 5 juta ton bungkil kedelai telah dipasok ke seluruh Indonesia. (RO/E-2) M-10

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☒ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



Kontribusi Sektor Pertanian bagi Ekonomi Nasional

Buruh tani menyabit padi sawah di Desa Pombewe, Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (7/9/2021). Kementerian Pertanian mengklaim, sektor pertanian memberi kontribusi positif sebesar 2,95 persen terhadap ekonomi nasional yang tumbuh 7,07 persen pada triwulan II-2021. Kontribusi itu meningkat dibanding 1,75 persen pada 2020. iD • 11

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Nasib Petani Cabai

• Harga cabai anjlok. Faktor penyebabnya, pertama, karena sepiunya pasar sebagai imbas dari PPKM. Faktor kedua yang memperparah karena pemerintah memberlakukan impor cabai. Padahal, pasokan cabai dari petani lokal banyak. P- 8/9/21

Sementara itu, alasan pemerintah mengambil kebijakan impor adalah untuk menstabilkan harga. Tentunya kondisi ini membuat para petani cabai mengalami kerugian besar. Besarnya harga jual tidak cukup untuk menutupi biaya produksi.

Aridha Nur Salim, Makassar

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Inovasi Kampus Berdaulat Pangan saat Pandemi



ACENG HIDAYAT

Sekretaris Institut IPB University,
Dosen Departemen Ekonomi
Sumberdaya dan Lingkungan,
FEM-IPB University

Ierminologi ketahanan pangan pertama kali mengemuka pada konferensi pangan dunia (World Food Conference, WFC) di Roma pada 1974. Terminologi ini muncul karena ada sejumlah negara tidak berkemampuan mengelola dan memenuhi kebutuhan pangannya. Penyebabnya adalah ketidakcukupan produksi dan ketidakmampuan negara mengelola fluktuasi harga pangan: Ujungnya, masyarakat mengalami kelaparan saat musim kemarau. Dua puluh dua tahun kemudian, pada WFC 1996 di Roma, konsep ketahanan pangan tersebut muncul kembali sebagai konsep yang perlu disepakati dan diterapkan di negara-negara anggota Food and Agriculture Organization (FAO).

Apa itu ketahanan pangan? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pa-

ngan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya ketercukupan pangan baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi ini sejalan dengan konsep ketahanan pangan yang disampaikan oleh FAO dan International Fund for Agriculture Development (IFAD).

Saat ini, konsep ketahanan pangan telah masuk dan masuk ke dalam jantung kebijakan pangan setiap negara. Indonesia pun telah mengadopsinya. Hal ini terlihat dalam UU Pangan dan kelembagaan badan ketahanan pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kritik atas SI-8/9/20 Ketahanan Pangan

Inti dari konsep ketahanan pangan tersebut, hemat penulis, adalah penekanannya pada ketersediaan dan akses pangan. Bukan pada peningkatan kapasitas produksi petani dan pertanian di dalam negeri. Konsep tersebut berimplikasi pada beberapa hal. *Pertama*, pangan menjadi komoditas. Siapa pun boleh memproduksi, mendistribusi, dan menjualnya. Petani

Amerika, China, Australia, Eropa atau negara-negara Asia dapat menyediakan pangan untuk kebutuhan orang Indonesia atau Afrika. Pun demikian, petani Indonesia dapat pula menyediakan pangan untuk penduduk negara lain.

Kedua, kondisi di atas memberikan peluang kepada petani di negara maju untuk memproduksi komoditas pertanian sebanyak-banyaknya. Dengan penguasaan teknologi yang baik, manajemen pertanian paripurna, dan didukung dengan lahan sangat luas mereka dapat menyediakan stok pangan melimpah dan setiap saat dapat mengeksportnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pengusaha besar (*multinational corporation* / MNC). Di antara MNC tersebut ada yang menguasai rantai pasok: produksi, distribusi, dan perniagaan. Bahkan sampai pada konsumsi siap saji. Istilahnya, dari benih hingga meja makan.

Dikutip dari ETC Group pada 2010, ada 10 korporasi pertanian internasional yang menguasai lebih dari 50% pasar dunia bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Mirisnya, yang menderita kemiskinan dan kesulitan bahan pangan adalah para petani.

Ketiga, para petani tadi hanya fokus pada beberapa komoditas pangan tertentu seperti

gandum, beras, jagung, dan kentang. Maka, secara masif mereka mengembangkan pertanian monokultur dengan mekanisasi. Implikasinya adalah terjadinya mekanisasi pertanian, dan penghilangan plasma nutfah yang tidak sesuai dengan kebutuhan perdagangan.

Keempat, mekanisasi pertanian dan transportasi bahan pangan antarbangsa sangat tergantung pada bahan bakar mineral, terutama minyak bumi dan batu bara. Hal ini berimplikasi pada peningkatan emisi karbon. Maka, konsep ketahanan pangan berperan pada pemanasan global.

Keempat hal di atas merupakan resume atas kritikan konsep ketahanan pangan dari Via Campesina. Via Campesina adalah bagian *civil society* berupa organisasi pergerakan petani internasional beranggotakan organisasi gerakan petani di masing-masing negara. Puncak dari kritiknya, Via Campesina memunculkan konsep kedaulatan pangan, sebagai tandingan atas konsep ketahanan pangan. Kon-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

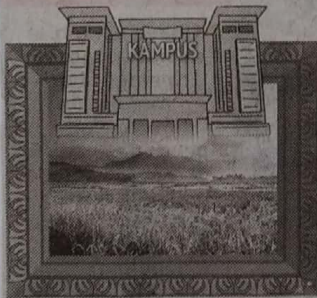
MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 8/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

sep kedaulatan pangan pertama kali muncul pada *World Food Summit 1996* di Roma, Italia.

Kedaulatan Pangan

Apa itu kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan hak rakyat atas pangan. Sedangkan di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.



Kedaulatan pangan menolak gagasan pangan bisa berasal dari mana saja. Yang penting ada. Kedaulatan pangan tegas bahwa pangan harus diusahakan dan dikelola sendiri untuk memenuhi diri sendiri. Dirisendiri dalam konteks entitas sebuah masyarakat, wilayah atau negara. Artinya, baik individu, wilayah atau negaranya berdaulat atas pangan. Tanpa dikte atau pengaruh bangsa, negara, atau budaya lain.

Dari paparan di atas, kedaulatan pangan memiliki beberapa dasar atau prinsip. *Pertama*, hak. Rakyat yang berdaulat dalam urusan pangan seyogianya memiliki kuasa penuh atas upaya memenuhi hak atas pangan

nya. Hak memilih dan menentukan pangan berkualitas sesuai dengan budaya lokal. Hak untuk menguasai teknologi benih, bibit, dan pupuk. Baik memproduksi maupun mendistribusikannya di kalangan para petani. Selain itu juga hak akses terhadap lahan. Terutama terhadap lahan-lahan yang dikuasai negara.

Kedua, kedaulatan pangan juga mengedepankan produksi pangan secara berkelanjutan. Sistem produksi yang diusung adalah pertanian agroekologi dan multitanaman (*multicroping*). Satu petak lahan ditanami aneka macam tanaman sehingga terjadi sinergi ekologis antartanaman yang berdampak pada perlindungan tanaman, kesuburan lahan, dan keberlanjutan *biodiversity*.

Dari uraian di atas kita mengerti bahwa kedaulatan pangan merupakan konsep yang ideal. Namun, penerapannya dalam suatu negara masih menghadapi tantangan berat. Untuk itu, kita memerlukan komunitas atau entitas yang dapat menjadi *role model* kedaulatan pangan. Hemat penulis, kampus perguruan tinggi cocok menjadi model penerapan kedaulatan pangan. Mengapa? Ada beberapa alasan.

Kampus Berdaulat Pangan

Kita sama-sama tahu bahwa suatu entitas dikatakan berdaulat jika memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, adanya wilayah atau *territory* dengan batas yang jelas. Batas tersebut tegas secara hukum dan siapa pun menghormatinya. *Kedua*, adanya populasi yang menempati atau melakukan aktivitas di dalamnya. *Ketiga*, ada kelembagaan, baik berupa aturan main maupun organi-

sasi mengelola entitas tersebut.

Dengan ketiga syarat minimal tadi, dapat kita katakan bahwa kampus sebagai entitas yang berdaulat. Semua syarat terpenuhi. Bahkan, ada syarat lain yang dapat memperkuat kedaulatan kampus dan tidak dimiliki entitas lain seperti desa, kota atau kabupaten yaitu kebebasan akademik. Sebuah kebebasan yang sangat mulia untuk melakukan kegiatan ilmiah tanpa ada tekanan dari manapun dan siapa pun. Dan, terakhir kampus adalah produsen teknologi. Dengan kebebasan akademik dan kedaulatan yang dimiliki makakampus dapat leluasa melakukan *trial and error* atas teknologi yang dikembangkan.

Dengan kelima keunggulan tadi, kampus dapat menjadi model kedaulatan pangan, yaitu suatu entitas berdaulat atas pangan. Di Indonesia terutama untuk kampus-kampus yang mengembangkan ilmu pertanian, seperti IPB University, UGM, Unpad, UB, USU, Unsri dan Unila. Kampus-kampus ini memiliki wilayah luas ratusan hektare. Di dalamnya pasti ada kebun-kebun percobaan baik untuk praktikum maupun penelitian. Mereka pasti pula sudah memiliki invensi atau inovasi di bidang pertanian. Mungkin inovasi dalam hal bibit, benih, pupuk, obat-obatan atau inovasi kelembagaan. Bagaimana cara mewujudkan model tersebut?

Pertama, kampus dapat menentukan inovasi yang akan diterapkan dalam mewujudkan model kedaulatan pangan. Misalnya, inovasi di bidang pertanian terpadu, pertanian ekologis atau pertanian permakultur. *Kedua*, menetapkan jenis tanaman yang akan diproduksi, misalnya yang paling mudah, aneka sayuran dan bumbu-bum-

buan. *Ketiga*, terapkan inovasi tersebut dalam suatu kawasan di dalam kampus. Dapat memaksimalkan lahan kosong atau lahan percobaan. *Keempat*, dalam pembuatan model tersebut melibatkan petani sekitar kampus sebagai pekerja harian atau sebagai pekerja kontrak. Mereka dibayar dengan hasil usaha produksi tersebut. *Kelima*, menetapkan pengelola yang mengatur sistem produksi, keuangan, dan pemasaran. Pasarnya adalah diutamakan warga kampus sendiri. Baik dosen, pegawai, dosen maupun kantin.

IPB University sebagai kampus pertanian tertua Indonesia sudah memulai dengan mengembangkan Kebun Mitigasi Risiko Krisis Pangan (KEMIRI). KEMIRI sudah memproduksi aneka sayuran untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Kami mengatur produksi agar bisa panen setiap hari. Pembeli dapat datang ke kebun atau pesan secara daring. Pembelinya adalah warga kampus, baik dosen maupun pegawai. Upaya kecil ini dapat terasa manfaatnya, terutama pada masa pandemi Covid-19 di mana kebanyakan dosen dan pegawai bekerja di rumah.

Perguruan tinggi dunia seperti The Earth University, Kostarika, sudah mempraktikkan hal ini lebih dulu. Mereka mempunyai slogan "*we eat what we grow*". Dan, bukan sekadar slogan. Mereka menyediakan bahan pangan berupa sayur, daging, telur, buah dari hasil produksi sendiri. Hasil pemanfaatan lahan praktikum dan penelitian yang dipadukan dengan kegiatan produksi.

KEMIRI adalah salah satu gagasan dan praktik inovasi kedaulatan pangan di kampus. Dan, penulis yakin hal ini benar dan perlu. □